BAB II

GAMBARAN UMUM PERUSAHAAN

2.1 Sejarah Perusahaan

Awal mula berdirinya Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bandung Cicadas adalah berawal dari terbitnya Surat Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 443/KMK.01/2001 tanggal 23 Juli 2001, tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak, Kantor Pelayanan Pajak, Kantor Pelayanan Pajak Bumi dan Bangunan, Kantor Pemeriksaan dan Penyidikan Pajak, serta Kantor Penyuluhan dan Pengamatan Potensi Perpajakan. Saat itu masih bernama KPP Bandung Cicadas karena belum ada konsep Pratama, Madya dan Wajib Pajak Besar (LTO). KPP Bandung Cicadas adalah pecahan dari KPP Bandung Cibeunying. Wilayah Kerja KPP Bandung Cicadas meliputi wilayah Timur Bandung, yakni Ujungberung dan Kecamatan Cimenyan Kabupaten Bandung.

Sejak tahun 2007 konsep administrasi pajak modern ditetapkan sehingga menggabungkan antara Kantor Pelayanan Pajak (KPP), Kantor Pelayanan Pajak Bumi dan Bangunan (KPPBB), dan Kantor Pemeriksaan Pajak (KARIKPA) menjadi satu konsep yakni Kantor Pelayanan Pajak Pratama, Madya, dan Wajib Pajak Besar.

Akibat dari penggabungan itu, maka KPP Bandung Cicadas berubah nama menjadi KPP Pratama Bandung Cicadas. Tahun 2007 wilayah kerja KPP Pratama Bandung Cicadas meliputi enam kecamatan, yaitu Kecamatan Cicadas,

Kecamatan Arcamanik, Kecamatan Cibiru, Kecamatan Ujungberung, Kecamatan Rancasari, Kecamatan Margacinta.

Seiring dengan perkembangan ekonomi dan penduduk dan geografis di Kota Bandung. Kecamatan yang merupakan wilayah kerja KPP Pratama Bandung Cicadas mengalami pemekaran dan pemecahan. Hingga di Tahun 2011 ini, wilayah kerja KPP Pratama Bandung Cicadas meliputi sepuluh kecamatan yakni : Kecamatan Mandalajati, Ujung Berung, Cibiru, Panyileukan, Cinambo, Arcamanik, Antapani, Buah Batu, Rancasari, dan Gede Bage.

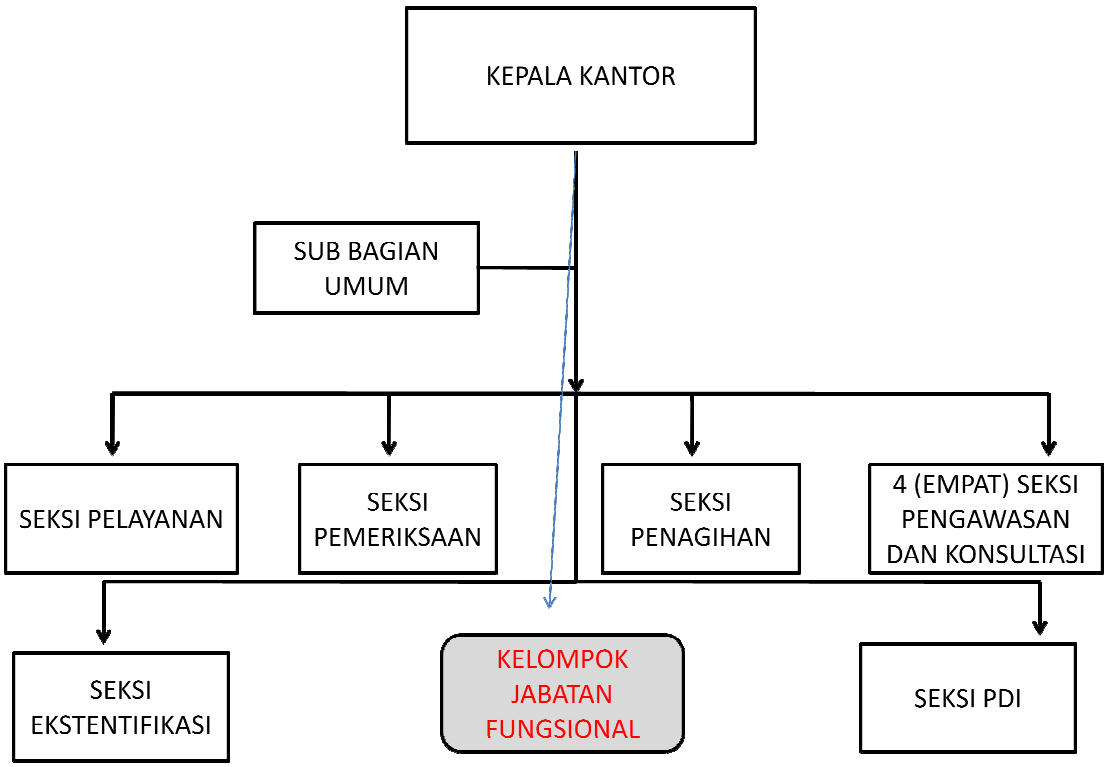


Gambar II.1 Peta Wilayah Kerja KPP Pratama Bandung Cicadas
Sumber : Seksi PDI KPP Pratama Bandung Cicadas

2.2 Struktur Organisasi Perusahaan

Suatu organisasi akan memberikan kinerja yang maksimal apabila ditunjang oleh anggota organisasi yang berkualitas. Begitu halnya dengan instansi pemerintahan, semakin bagus Sumber Daya Manusia (SDM) di suatu instansi maka kemungkinan hasil adalah tingginya kinerja yang dicapai. Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bandung Cicadas sebagai instansi publik yang melayani masyarakat pembayar pajak sudah sejatinya memiliki pegawai yang memiliki sumber daya manusia yang mumpuni agar bisa memberikan pelayanan yang maksimal sehingga bisa memenuhi tugas utama sebagai penopang keuangan negara.

Secara hierarki vertikal, KPP Pratama Bandung Cicadas berada dalam unit eselon III. Induk organisasi adalah Kementerian Keuangan, Eselon I adalah Direktorat Jenderal Pajak, Eselon II adalah Kantor Wilayah DJP Jawa Barat I, dan unit Eselon III adalah KPP Pratama Bandung Cicadas. Unit Eselon IV di KPP Pratama Bandung Cicadas adalah 9 Seksi dan 1 Sub Bagian Umum. Seksi yang ada di lingkungan KPP Pratama adalah Seksi Pemeriksaan, Seksi Penagihan, Seksi Ekstentifikasi, Seksi Pengolahan Data dan Informasi (PDI), Seksi Pelayanan, dan 4 (empat) Seksi Pengawasan dan Konsultasi. Selain itu ada juga kelompok jabatan fungsional. Untuk lebih jelas lihat di Gambar II.2



Gambar 2.2 Struktur Organisasi KPP Pratama Bandung Cicadas.

Tabel 2.1 Jumlah Pegawai Menurut Jabatan di KPP Pratama Bandung Cicadas

No.	Jabatan	Jumlah	Keterangan
1	Eselon III	1	Kepala Kantor
2	Eselon IV	10	Kepala Seksi/Sub Bagian Umum
3	Fungsional	13	Pemeriksa = 12 dan Penilai PBB= 1
4	Account Representative	19	4 Seksi Waskon
5	Pelaksana	38	Pelaksana
Jumlah		81	

Sumber : Sub Bagian Umum KPP Pratama Bandung Cicadas

Berdasarkan data di Tabel 2.1, terlihat kalau jabatan pegawai di KPP Pratama Bandung Cicadas adalah Pelaksana dengan jumlah pegawai terbanyak. Account Representative menduduki posisi kedua terbanyak dengan jumlah 19 pegawai.

Diikuti Fungsional dengan jumlah 13 orang dengan komposisi terbanyak adalah Fungsional Pemeriksa Pajak sebanyak 12 orang.

Melihat komposisi tersebut, maka jumlah pegawai sebanyak 81 orang harus melayani sekitar 568.909 jiwa yang ada di 10 kecamatan. Tentunya tidak semua penduduk di wilayah ini sudah mempunyai NPWP akan tetapi jika diihat secara kasar, jumlah pegawai sebanyak 81 orang belum layak.

Tabel 2.2 Jumlah Pegawai Menurut Tingkat Pendidikan Di Kpp Pratama Bandung Cicadas (30 Juni 2011)

No	Tingkat Pendidikan	Jumlah	Persentasi
1	Sma/Lebih Rendah	19	23%
2	Diploma I/III	19	23%
3	Sarjana (Strata 1)	37	46%
4	Magister/Strata 2	6	7%
	Total	81	100%

Sumber : Sub Bagian Umum Kpp Pratama Bandung Cicadas

Tabel 2.2 menunjukan tingkat pendidikan pegawai dengan komposisi terbanyak adalah Sarjana Strata I atau S-1. Diikuti oleh SMA/Lebih rendah dan Diploma. Melihat angka tersebut, masih ada sekitar 23% pegawai KPP Pratama Bandung Cicadas yang memiliki tingkat pendidikan masih SMA atau bahkan lebih rendah. Walaupun tidak selamanya tingkat pendidikan berpengaruh terhadap kinerja pegawai, akan tetapi di era globalisasi pendidikan adalah hal yang paling utama. Diharapkan peluang beasiswa bagi pegawai yang belum sarjana akan lebih terbuka sehingga kualitas SDM di KPP Pratama Bandung Cicadas akan semakin berkualitas.

2.3 Uraian Tugas perusahaan

Kantor Pelayanan Pajak Pratama Cicadas Bandung memiliki uraian tugas perusahaan diantaranya:

1. Kepala KPP Pratama

   Orang yang mengepalai KPP Pratama dan bertanggung jawab atas kegiatan pada KPP Pratama;

2. Subbagian Umum

   Subbagian Umum mempunyai tugas melakukan urusan kepegawaian, keuangan, tata usaha, dan rumah tangga;

3. Seksi Pengolahan Data dan Informasi

   Seksi Pengolahan Data dan Informasi mempunyai tugas melakukan pengumpulan, pencarian, dan pengolahan data, penyajian informasi perpajakan, perekaman dokumen perpajakan, urusan tata usaha penerimaan perpajakan, pengalokasian Pajak Bumi dan Bangunan dan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan, pelayanan dukungan teknis komputer, pemantauan aplikasi e-SPT dan e-Filing, pelaksanaan i-SISMIOP dan SIG, serta penyiapan laporan kinerja;

4. Seksi Pelayanan

   Seksi Pelayanan mempunyai tugas melakukan penetapan dan penerbitan produk hukum perpajakan, pengadministrasian dokumen dan berkas perpajakan, penerimaan dan pengolahan Surat Pemberitahuan, serta penerimaan surat lainnya, penyuluhan perpajakan, pelaksanaan registrasi wajib pajak, serta melakukan kerjasama perpajakan;

5. Seksi Penagihan

   Seksi Penagihan mempunyai tugas melakukan urusan penatausahaan piutang pajak, penundaan dan angsuran tunggakan pajak, penagihan aktif, usulan penghapusan piutang pajak, serta penyimpanan dokumen-dokumen penagihan;

6. Seksi Pemeriksaan

   Seksi Pemeriksaan mempunyai tugas melakukan penyusunan rencana pemeriksaan, pengawasan pelaksanaan aturan pemeriksaan, penerbitan dan penyaluran Surat Perintah Pemeriksaan Pajak serta administrasi pemeriksaan perpajakan lainnya;

7. Seksi Ekstensifikasi Perpajakan

   Seksi Ekstensifikasi Perpajakan mempunyai tugas melakukan pengamatan potensi perpajakan, pendataan objek dan subjek pajak, penilaian objek pajak dalam rangka ekstensifikasi;

8. Seksi Pengawasan dan Konsultasi I, II, III, IV

   Seksi Pengawasan dan Konsultasi I, Seksi Pengawasan dan Konsultasi II, Seksi Pengawasan dan Konsultasi III, serta Seksi Pengawasan dan Konsultasi IV, masing-masing mempunyai tugas melakukan pengawasan kepatuhan kewajiban perpajakan Wajib Pajak, bimbingan/himbauan kepada Wajib Pajak dan konsultasi teknis perpajakan, penyusunan profil Wajib Pajak, analisis kinerja Wajib Pajak, melakukan rekonsiliasi data Wajib Pajak dalam rangka melakukan intensifikasi, dan melakukan evaluasi hasil banding;

9. Kelompok Jabatan Fungsional

   Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melakukan kegiatan sesuai dengan jabatan fungsional masing-masing berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

   a) Kelompok Jabatan Fungsional terdiri dari sejumlah jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan bidang keahliannya;
   b) Setiap kelompok tersebut dikoordinasikan oleh pejabat fungsional senior yang ditunjuk oleh Kepala Kantor Wilayah, atau Kepala KPP yang bersangkutan;
   c) Jumlah Jabatan Fungsional tersebut ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja;
   d) Jenis dan jenjang jabatan fungsional diatur sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

2.4 Kegiatan Perusahaan

KPP Pratama Bandung Cicadas merupakan salah satu dari 5 KPP Pratama yang ada di Kota Bandung. Dengan wilayah kerja yang meliputi 10 Kecamatan dan 41 Kelurahan serta jumlah penduduk mencapai 586.909 jiwa maka tidak heran jika target penerimaan pajak KPP Pratama Bandung Cicadas sebanding dengan KPP Pratama lain yang wilayah kerjanya satu kota/kabupaten. Target penerimaan pajak di tahun 2009 ditetapkan sebesar Rp 354,333 milyar di tahun

2010 naik menjadi Rp 459,509 milyar. Hingga di tahun 2011 target penerimaan pajak KPP Pratama Bandung Cicadas adalah sebesar Rp 597,362 milyar.

Untuk Realisasi penerimaan pajak, di tahun 2009 KPP Pratama Bandung Cicadas berhasil mencetak angka Rp 540,226 milyar jauh dari jumlah yang ditargetkan sebesar Rp 354,33 milyar. Tahun 2010 realisasi penerimaan mencapai Rp 509,852 milyar. Terakhir hingga Juni 2011, KPP Pratama Bandung Cicadas telah membukukan penerimaan sebesar Rp 209,671 milyar atau masih di bawah rencana semester I tahun 2011 sebesar Rp 217,610 milyar. Untuk lebih jelas, lihat di Tabel 2.3.

Tabel 2.3 Target dan Realisasi Penerimaan Pajak di KPP Pratama Bandung Cicadas

Tahun	Realisasi (Juta Rupiah)	Rencana (Juta Rupiah)	Pencapaian (Persen)
2009	540.226,1	354.333,7	152 %
2010	509.852,2	459.509,4	111 %
2011	209.671,8	597.362,2	35 %
2011 (Rencana s/d Juni 2011)	209.671,8	217,610	96 %

Sumber : Seksi Pengawasan dan Konsultasi II

Penerimaan pajak yang dicatat oleh KPP Pratama Bandung Cicadas berasal dari banyak lapisan Wajib Pajak. Selain lapisan yang bermacam-macam, sektor usaha yang beragam menjadi penyumbang penerimaan pajak di KPP Pratama Bandung Cicadas. Dilihat dari aspek geografis, KPP Bandung Cicadas berada di perbatasan antara Kota Bandung dengan Kabupaten Bandung menuju Kabupaten Sumedang. Aspek *antrhopologhist* menempatkan Kota Bandung sebagai Kota Urbanisasi yang menawarkan peluang usaha bagi berbagai macam suku atau etnis yang membuat sektor usaha di wilayah ini menjadi beragam.

Pengembangan kawasan berikat Gede Bage menjadi wilayah industri membuat pabrik-pabrik bermunculan yang tentunya membuat wilayah KPP Pratama Bandung Cicadas berpotensi untuk mendapatkan penerimaan dari sektor industri manufaktur, tekstil, dan pabrikasi lainnya. Adanya mall di wilayah Buah Batu dan Antapani menjadikan sektor perdagangan dan jasa sebagai sektor potensial untuk digali potensi pajaknya.

Dekatnya lokasi jalan tol membuat pintu wisatawan domestik yang berkunjung ke Kota Bandung khususnya wilayah Bandung Timur menjadi potensi tersendiri bagi sektor usaha perhotelan dan kuliner. Maraknya *Factory Outlet* yang tidak hanya ada di pusat kota membuat wilayah KPP Pratama Bandung Cicadas menjadi penuh akan potensi.

Tabel 2.4 Sektor-Sektor Penyumbang Penerimaan Pajak Terbesar Bagi KPP Pratama Bandung Cicadas di S/d Juni 2011

KLU	Uraian Sektor Kelompok Lapangan Usaha	Penerimaan
51000	Perdagangan Besar Dalam Negeri, Kecuali Perdagangan Mobil Dan Sepeda Motor Selain Ekspor Dan Impor	61.132.156.028
45000	Konstruksi	6.487.361.873
74000	Jasa Perusahaan Lainnya	6.230.519.865
95000	Jasa Perorangan	5.731.691.100
70000	Real Estat	4.904.826.547

Sumber : Seksi PDI KPP Pratama Bandung Cicadas.

Melihat Tabel 2.4 bisa disimpulkan kalau sektor perdagangan menjadi sektor yang dominan. Kawasan Bandung Timur bersiap menjadi Kawasan Bisnis Terpadu. Perdagangan Besar Dalam Negeri akan memberikan potensi untuk digali.

Sektor yang dominan berikutnya adalah Jasa Konstruksi. Sebagai ibu kota Provinsi Jawa Barat, Kota Bandung menjadi magnet tersendiri bagi masyarakat yang ingin berinvestasi ataupun menetap di Kota Bandung. Apalagi, pengembangan perumahan-perumahan baru mulai menawarkan banyak keuntungan dan keunggulan bagi sektor real esatate. Tidak heran jika real estate menduduki posisi lima besar penyumbang penerimaan pajak bagi KPP Pratama Bandung Cicadas.

Penerimaan Pajak di KPP Pratama Bandung Cicadas tidak terlepas dari kinerja keuangan pelaku usaha di sektor terkait. Mengandalkan dari perdagangan besar yang sebagian besar pelaku usaha menjual barang dan jasa kena pajak, KPP Bandung Cicadas menggantungkan penerimaan pajak terhadap Pajak Pertambahan Nilai. Untuk lebih rinci lihat Tabel 2.5.

Tabel 2.5 Penerimaan Per Jenis Pajak KPP Pratama Bandung Cicadas

Jenis Pajak	2011	2010	2009
Pajak Penghasilan	78.714.942.472	147.302.110.251	108.767.526.234
Pajak Pertambahan Nilai	120.434.421.227	273.619.079.650	181.408.532.357
PPn BM	1.947.228.044	4.206.256.525	780.409.248
PBB dan BPHTB	8.523.204.571	84.692.847.426	249.268.302.328
Pajak Lainnya	52.098.638	31.960.303	1.341.933
Total	209.671.894.952	509.852.254.155	540.226.112.100

Sumber : Seksi Pengawasan dan Konsultasi II

Pajak Pertambahan Nilai menjadi penyumbang terbesar dengan Rp 120 milyar s/d Juni tahun 2011, Rp 273 milyar di tahun 2010, dan di tahun 2009 Rp 181 milyar. Disusul di urutan kedua adalah Pajak Penghasilan yang cukup mengejutkan penerimaannya kalah oleh PBB dan BPHTB di tahun 2009.

Menurut keterangan yang ada, Tahun 2009 penerimaan PBB dan BPHTB cukup besar karena adanya sumbangan PBB Pertambangan yang jumlahnya mencapai ratusan milyar rupiah. Selain itu, di tahun 2009 BPHTB belum beralih ke Pemerintah Daerah pemungutannya sehingga menyumbang penerimaan yang cukup besar.

Dalam melaksanakan tugasnya kegiatan KPP Pratama Bandung-Cicadas menyelenggarakan fungsi:

a. Pengumpulan, pencarian dan pengolahan data, pengamatan potensi perpajakan, penyajian informasi perpajakan, pendataan objek dan subjek pajak, serta penilaian objek Pajak Bumi dan Bangunan;
b. Penetapan dan penerbitan produk hukum perpajakan;
c. Pengadministrasian dokumen dan berkas perpajakan, penerimaan dan pengolahan Surat Pemberitahuan, serta penerimaan surat lainnya;
d. Penyuluhan perpajakan;
e. Pelaksanaan registrasi wajib pajak;
f. Pelaksanaan ekstensifikasi;
g. Penatausahaan piutang pajak dan pelaksanaan penagihan pajak;
h. Pelaksanaan pemeriksaan pajak;
i. Pengawasan kepatuhan kewajiban perpajakan wajib pajak;
j. Pelaksanaan konsultasi perpajakan;
k. Pelaksanaan intensifikasi;
l. Pelaksanaan administrasi KPP Pratama;